

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kerajaan Mughal, perkembangan Islam sangat mengagumkan. India merupakan suatu negara yang memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kompleksitas suku, ras, budaya, dan berbagai macam agama, kerajaan Mughal menjadi salah satu kerajaan terbesar di abad pertengahan.¹ Selain kerajaan Syafawi di Persia dan Turki Utsmani di Turki. Uniknya, para penguasa Islam di kerajaan Mughal ini memerintah masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Meski muncul beberapa pemberontakan dari beberapa kalangan, namun Mughal berhasil membawa kegemilangan bagi sejarah India.

Kerajaan Mughal di India berdiri pada tahun 1526-1858 M² didirikan oleh Zahiruddin Babur setelah ia berhasil mengalahkan pasukan Ibrahim Lodi dalam pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat.³ Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Syafawi di Persia.⁴ Kerajaan ini berpusat di India dengan ibukota pemerintahan di Delhi, dapat bertahan selama kurang dari tiga setengah abad (atau sekitar 320 tahun), dan berhasil menguasai wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Hindu, sementara

¹Ading Kusdiana, *Sejarah & Kebudayaan Islam: Periode Pertengahan*, cet. ke-I, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), hal 228.

²Moh Nur Hakim, *Sejarah dan Peradaban Islam* (Malang: Umm Press, 2004), hal. 147.

³Ading Kusdiana, *sejarah & Kebudayaan Islam...*, hal. 230.

⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 145.

umat Islam hanyalah sebagai kelompok minoritas.⁵ Babur meninggal dunia pada tahun 1530 M, ketika berusia 48 tahun, setelah ia berkuasa selama empat tahun yaitu antara tahun 1526-1530 M.

Kemudian pemerintahan selanjutnya dipegang oleh anaknya yaitu Humayun,⁶ ia memerintah tahun 1530-1539 M⁷ dan 1555-1556 M.⁸ Di masa pemerintahan Humayun, kerajaan Mughal pernah mengalami kevakuman sekitar 15 tahun mulai dari tahun 1540 sampai 1555 M⁹, dikarenakan banyak mendapat tantangan dan berbagai pemberontakan dari kalangan umat Hindu. Karena usia pemerintahan yang ditinggalkan masih relatif muda dan belum stabil. Salah satunya pemberontakan dari Bahadur Syah seorang penguasa dari Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi, tetapi pemberontakan tersebut dapat diatasi oleh Humayun dan Gujarat dapat dikuasai.¹⁰

Dan di tahun 1555 M, kedudukan atas kerajaan Mughal kembali ke tangan Humayun. Belum lama menduduki singgasana kerajaan di tahun 1556

UIN IMAM BONJOL
PADANG

⁵Moh Nur Hakim, *Sejarah dan Peradaban ...*, hal. 147.

⁶Firdaus, dan Desmaniar., *Negara Adikuasa Islam: Fase Kedua Abad XIV-XX Masehi*, cet.ke-I, (Padang: IAIN-IB Press, 2000), hal. 81.

⁷Pada tahun 1539 M Sher Khan Suri menginvasi ke pusat pemerintahan Humayun di Delhi. Lihat Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Islam Di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 204. Pada tahun 1540 M terjadi peperangan di Kanauj, dalam pertempuran ini Humayun mengalami kekalahan dan ia terpaksa melarikan diri ke Persia. Lihat Ading Kusdiana, *sejarah & Kebudayaan Islam...*, hal. 232.

⁸ Pada tahun 1555 M kembalinya ke India dan menduduki tahta kerajaan setelah berhasil mengalahkan Sher Khan yang hampir 15 tahun berkelana meninggalkan Delhi. Setahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1556 M ia meninggal dunia karena terjatuh dari tangga perpustakaan. *Ibid.*, hal 232-233.

⁹Maidir Harun, *Hand Out: Sejarah Kebudayaan dan Islam V(Persia dan India)*, (Padang: IAIN Press, 2016), hal. 76.

¹⁰Abd. Rahim Yunus dan Abu haif, *Sejarah Islam Pertengahan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 299.

M hal buruk menyimpannya. Ia terjatuh dari tangga istana dan meninggal dunia.¹¹

Setelah pemerintahan Humayun berakhir kemudian digantikan oleh anaknya Akbar. Ia merupakan pemimpin yang memiliki gagasan-gagasan diktator dan liberal. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah Dinasti Islam yang terbesar di India.

Ketika Akbar menerima tahta kerajaan saat itu, ia berusia 14 tahun sehingga urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan seorang penganut Syi'ah. Akbar baru berkuasa secara penuh pada tahun 1560 M, karena tidak tahan melihat pengaruh Bairam Khan yang terlalu mementingkan Syi'ah, sehingga berdampak pada situasi dan kondisi masyarakat yang beragam.¹²

Untuk menghindari ketidakstabilan dalam masyarakat dan kewajibannya sebagai seorang raja, ia mulai menerapkan kebijakan-kebijakannya. Sehingga ia mampu mengantar kerajaan Mughal mencapai puncak kejayaan dan di anggap sebagai pendiri kerajaan Mughal yang sebenarnya. Kebijakan politiknya yang paling menonjol adalah sistem politik *Sulh-e-kul* atau toleransi universal yaitu politik yang memandang semua rakyat sama derajatnya, mereka tidak dibedakan sama sekalipun oleh ketentuan agama maupun lapisan sosial.¹³

¹¹Syed Mahmudunnasir, *Islam dan Konsepsi Sejarah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 354.

¹²*Ibid.*, hal. 357.

¹³Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Islam...*, hal. 205.

Dengan adanya sistem ini, maka masyarakat Hindu dan Islam dapat hidup berdampingan dalam membangun pemerintahan di India. Sehingga, hal inilah yang membuat sebuah reformasi di dalam aturan politik Mughal sebelumnya di bawah pemerintahan Sultan Babur dan Humayun.

Kemajuan kerajaan Mughal tidak lepas dari peranan Akbar dalam menjalankan politiknya. Ia merupakan orang yang cerdas untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa Islam, dengan menciptakan berbagai strategi guna untuk memberi keharmonisan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Seperti menerapkan sistem perkawinan politik agar dapat memperoleh dukungan dari mayoritas Hindu kepada kerajaan Mughal. Menghapuskan sistem *jizyah* terhadap non Muslim guna menghilangkan perbedaan antara Muslim dan non Muslim, terhadap bidang pendidikan ia memberikan pelayanan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat, yakni mendirikan madrasah-madrasah khusus dan memberikan tanah-tanah wakaf bagi lembaga-lembaga sufi berupa *iqtha* atau *madad ma'asy*.¹⁴

Selain itu, untuk dapat mempengaruhi dan menguasai rakyat India yang mayoritas menganut agama Hindu, Akbar sangat toleran dalam beragama, berbeda dengan pendahulunya. Ia menerapkan politik keagamaan yaitu *Din-i-ilahi*, yang memiliki tujuan menumbuhkan rasa kesatuan antar golongan di bawah satu pemerintahan kerajaan Mughal. Sebab inilah cara yang paling bijaksana dalam mengatasi masalah-masalah hukum di India. Juga

¹⁴*Ibid*, hal. 205-206.

merupakan salah satu lembaga dari ide politik *Sulh-e-kul*.¹⁵ Sehingga mereka bebas beraktivitas dan memperoleh hak yang sama sebagai warga negara. Dengan ide politik *Sulh-e-kul* yang diterapkannya dapat mempererat hubungan sosial orang Islam dengan orang Hindu.

Sultan Akbar semasa memerintah dikenal sebagai raja yang bijak dan adil. Kebijakan-kebijakan yang diterapkannya semata-mata merupakan strategi di dalam pemerintahan guna mendekatkan dirinya kepada masyarakat dan mengerti kehendak hati masyarakatnya. Hal inilah yang menjadikan keberhasilannya selama 49 tahun pemerintahannya di India. Tanpa adanya sistem politik *Sulh-e-kul* Akbar mungkin kerajaan Mughal tidak dapat berkembang dan mengalami masa kejayaannya di India. Wilayah kekuasaannya terbentang luas dari Punjab sampai ke Bengal Timur, Kashmir dan Kabul di Utara sampai Deccan di Selatan.¹⁶

Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang apa kebijakan politik Sultan Akbar terhadap perkembangan peradaban di India. Maka hal inilah yang menarik untuk dianalisa dan diteliti, dengan judul penelitian ini adalah **“Kebijakan Politik Sultan Akbar Dalam Menciptakan Harmonisasi Umat Beragama di India (1526-1605 M).”**

¹⁵Ading Kusdiana, *Sejarah & Kebudayaan Islam...*, hal. 234.

¹⁶Machfud Syaefudin, dkk., *Dinamika Peradaban Islam: Perspektif Historis*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2013), hal. 232.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar permasalahan lebih terarah sesuai objek yang dituju, maka dalam hal ini penulis mencoba merumuskan masalah tentang:

- a. Bagaimana asal-usul kerajaan Mughal dan biografi Sultan Akbar.
- b. Apa kebijakan politik Sultan Akbar dalam menciptakan harmonisasi umat beragama di India.

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan tidak mengembangnya permasalahan ini, maka penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

a. Batasan Spasial

Batasan spasial adalah batasan wilayah yang akan dikaji. Dilihat dari latar belakang masalah daerah dan wilayah maka penulis membatasi kawasan wilayah kekuasaan dan pengaruh politiknya sultan Akbar meliputi Punjab sampai ke Bengal di Timur, Kashmir dan Kabul di Utara sampai Deccan di Selatan.¹⁷

b. Batasan temporal

Batasan temporal adalah batasan waktu. Adapun rentang waktu penelitian penulis yaitu dari tahun 1526-1605 M. Pemilihan masa ini dikarenakan dari tahun ini 1526 M merupakan awal mula berdirinya kerajaan Mughal. Sedangkan tahun 1605 M merupakan akhir masa

¹⁷ *Ibid.*, hal. 232.

pemerintahan Sultan Akbar, juga peristiwa meninggalnya dan digantikan oleh anaknya Jehangir.¹⁸

c. Batasan tematis

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penulis mencoba membatasi pembahasannya. Di mana penulis membahas tentang apa kebijakan politik Sultan Akbar dalam bidang perkawinan, jizyah, pendidikan, dan kehidupan beragama.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam setiap pembahasan terhadap suatu masalah pada umumnya mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian penulis yaitu:

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui lebih dalam mengenai sejarah peradaban Islam di bagian benua India dan khususnya sejarah Islam di masa pemerintahan Sultan Akbar kerajaan Mughal. Mengetahui kebijakan politik Sultan Akbar dalam bidang perkawinan, *jizyah* bagi non-muslim, pendidikan sama antara Muslim dan non-Muslim, dan kehidupan umat beragama di India.

2. Kegunaan penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Humaniora pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.

¹⁸Firdaus, dan Desmaniar, *Negara Adikuasa Islam...*, hal. 86.

- b. Menambah wawasan penulis dalam menuliskan tentang kebijakan Sultan Akbar dalam bidang perkawinan, *jizyah*, pendidikan, dan kehidupan beragama. Sehingga nanti hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan Sultan Akbar dalam membangun keharmonisan umat beragama di India.
- c. Sebagai tambahan Literature untuk kepustakaan dan untuk bahan bacaan di Pustaka Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang terutama yang berkaitan dengan Sejarah Asia Barat.
- d. Sebagai bahan untuk menambah khazanah pengetahuan tentang sejarah Islam dan dapat menjadi referensi bagi yang memerlukan terutama bagi mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam.
- e. Sebagai sumber acuan terhadap penulisan selanjutnya ataupun penulisan lain di bidang yang sama.
- f. Mengungkapkan salah satu metode perjuangan umat Islam di India yang berhasil mencapai kejayaan pada masa kerajaan Mughal.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan hal-hal yang dirasa perlu sehingga dapat menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini. Dan penulis sedikit mengulas tentang judul **“Kebijakan Politik Sultan Akbar Dalam Menciptakan Harmonisasi Umat beragama di India (1526-1605 M).”** sebagai berikut ini :

- Kebijakan : Suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.¹⁹
- Politik : Politik adalah segala macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut pengaturan pemerintahan yang di dalamnya termasuk sistem, kebijaksanaan, serta siasat baik kepada urusan dalam negeri maupun luar negeri.²⁰
- Sultan Akbar : Sultan Akbar merupakan sultan ketiga yang diberi gelar Sultan *Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan*.²¹ Putra dari Sultan Humayun dan cucu dari Sultan Mughal Zahiruddin Muhammad Babur, penguasa yang mendirikan Dinasti Mughal di India.
- India : Wilayah kekuasaan dan pengaruh politik Sultan Akbar meliputi wilayah yang terbentang luas dari Punjab sampai ke Bengal Timur, Kashmir dan Kabul di Utara sampai Deccan di Selatan..²²

Jadi, yang dimaksud dengan penjelasan judul di atas adalah Sultan Akbar ingin menyatukan hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat Hindu yang sangat beragam dan heterogen bila dilihat dari sudut keyakinan

¹⁹M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, cet. ke-3, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hal. 20.

²⁰Babudi dan Sutan Mohammad Zaid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal 1078.

²¹Machfud Syaefudin, dkk, *Dinamika Peradaban Islam...*, hal. 231.

²²*Ibid*, hal. 232.

agama, kasta, suku, bahasa dan budaya guna untuk terciptanya integrasi dan kesejahteraan umat beragama di India.

E. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis meninjau kembali penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kajian politik sultan Akbar di India tahun 1556-1605 M.

Adapun bahan yang membantu penulis dalam menelusuri penulisan ini dapat dijumpai dalam Jurnal Khazanah Vol. IV No. 2, Juli-Desember 2004 ditulis oleh Siti Aisyah yang berjudul *Kerajaan Mughal di India: Pembentukan, Kemajuan, dan Kemunduran*. Dalam jurnal ini ia menjelaskan pada gaya kepemimpinan Sultan Akbar.

Buku yang berjudul *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, tulisan Ajid Thohir, tahun 2004. Buku ini hanya menjelaskan sedikit tentang ide dan pokok politik *Sulh-e-kul* sultan Akbar.

Buku yang berjudul *Sejarah & Kebudayaan Islam: Periode Pertengahan*, tulisan Ading Kusdiana, tahun 2013. Buku ini membahas seputar awal berdirinya kerajaan Mughal sampai akhir pemerintahan kerajaan Mughal. Adapun tentang kebijakan politik Sultan Akbar hanya sedikit penjelasan.

F. Metode Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini merupakan kajian pustaka (*Library Research*). Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian sangat menentukan keberhasilan dalam menghimpun sumber yang dibutuhkan,

karena penelitian ini bersifat historis. Maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah mencari dan menelusuri sumber-sumber sejarah yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan kebijakan ide pokok politik Sultan Akbar. Sumber sejarah secara umum dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Sumber primer, maksudnya semua bahan-bahan material yang ditulis atau yang dibuat pada masa kejadian sejarah atau peristiwa historis yang diteliti. Adapun sumber primer penulis dalam penelitian ini yaitu buku Umar Asasuddin Sokah, *Din-i-Ilahi: Kontroversi Keberagaman Sultan Akbar Agung (India1560-1605)*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 1994).
- b. Sumber sekunder dalam penelitian ini penulis mencari dan menggunakan sumber-sumber di perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, perpustakaan pascasarjana, perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, dan Perpustakaan Daerah. Selain itu sumber yang dikumpulkan melalui skripsi, jurnal/artikel dan internet dengan melakukan penelusuran terhadap media *online* sebagai tambahan sumber

2. Kritik sumber

Setelah penulis mendapat data-data yang berkaitan, maka penulis melakukan kritik sumber untuk menentukan keakuratan sumber yang digunakan. Di mana penulis melakukan kritik sumber interen serta eksteren. Kritik sumber interen adalah kritik untuk menguji sumber apakah sumber itu objektif dan kredibel, sedangkan kritik sumber eksteren yaitu untuk menguji kapabilitas pengarang.

3. Sintesis

Setelah fakta-fakta yang terpilih melalui kritik sumber tersebut, kemudian disintesiskan pertama-tama sumber tersebut dikelompokkan berdasarkan pertimbangan urutan waktu, tempat maupun berdasarkan tema (masalah) dan aspek dengan proporsinya. Selanjutnya antara sumber satu dengan sumber lainnya dirangkai untuk mencari fakta yang satu dengan yang lainnya, sehingga dengan demikian dapat membentuk kerangka penulisan tentang kebijakan politik Sultan Akbar dalam menciptakan harmonisasi umat beragama di India.

4. Penulisan

Penulisan merupakan kegiatan mendeskripsikan hasil penelitian kedalam bentuk karya tulis, dalam penulisan ini menggunakan bentuk penulisan berdasarkan proses sejarah yang sesuai dengan urutan fakta-fakta sebagai suatu proses dalam jangka tertentu atau urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan urutan yang sesungguhnya terjadi (deskriptif-naratif) dan penulisan yang berpusat pada masalah yaitu

mengungkapkan berbagai tingkat atau dimensi dari aktualitas sejarah dan diuraikan secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam sistematika penulisan merangkai hasil penulisan ini penulis membagi dalam beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub-bab sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Asal-usul kerajaan Mughal dan biografi Sultan Akbar.
- Bab III : Kebijakan politik Sultan Akbar.
- Bab IV : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG